

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN EFISIENSI PERPAJAKAN  
ATAS KEWAJIBAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
BAGI KONTRAKTOR KERJA SAMA  
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**Tanaya Yuwono<sup>\*</sup>, Adrianto Dwi Nugroho<sup>\*\*</sup>**

**ABSTRAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Volume transaksi yang sangat besar dalam industri hulu migas menjadi potensi penerimaan bagi negara. Namun industri hulu migas memiliki kompleksitas bisnis, kontrak dan perusahaan. Pemerintah kemudian melakukan penunjukan khusus bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk memudahkan pemungutan dan pembayaran PPN.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan memfokuskan studi terhadap hukum positif melalui pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Metodologi analisis kualitatif dilakukan terhadap ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan konsep teori kepastian hukum dan efisiensi perpajakan.

Praktik pelaksanaan pemungutan PPN ternyata tidak sederhana karena penentuan objek PPN berkaitan dengan kebijakan pemberian fasilitas PPN di sektor hulu migas. Disamping itu, kesepakatan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan KKKS hulu migas menentukan bagaimana ketentuan perpajakan dilaksanakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum telah terpenuhi baik secara substansi, struktur dan budaya. Namun, implementasi dari kebijakan penunjukan KKKS hulu migas sebagai pemungut PPN masih perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan distorsi berlebih bagi kegiatan bisnis utama, sehingga cukup memenuhi aspek efisiensinya.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, hulu migas, efisiensi perpajakan

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>\*\*</sup> Dosen Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AND TAX EFFICIENCY  
REGARDING THE OBLIGATION TO COLLECT VALUE ADDED TAX  
FOR OIL AND GAS UPSTREAM CONTRACTORS***

***Tanaya Yuwono\* , Adrianto Dwi Nugroho\*\****

***ABSTRACT***

*Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on transactions involving taxable products and/or services. The substantial transaction volume in the upstream oil and gas sector presents a prospective source of government revenue. Nonetheless, the upstream oil and gas sector exhibits complications in business, contractual, and corporate structures. The government subsequently established a targeted policy for upstream oil and gas Cooperation Contract Contractors (KKKS) to streamline the collection and remittance of VAT.*

*This normative legal research concentrates on positive legislation utilizing a statutory approach. Secondary data was obtained via library research and documentation analysis. The qualitative analysis methodology is utilized to examine the relevant legal provisions in relation to the theory of legal certainty and tax efficiency.*

*The execution of this policy proves to be complex due to the identification of VAT subjects being associated with the policy of granting VAT incentives in the upstream oil and gas sector. The cooperation contract between the government and upstream oil and gas contractors delineates the implementation of tax rules.*

*The analysis indicates that the components of legal certainty have been satisfied for substance, structure, and culture. Nonetheless, the execution of this policy requires further refinement to prevent significant disruption to core corporate operations, thereby adequately addressing tax efficiency.*

***Keywords:*** *Value Added Tax, upstream oil and gas, tax efficiency*

---

\* Postgraduate students of the Faculty of Law, Gadjah Mada University

\*\* Lecturer at the Tax Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University